

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perspektif Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan salah satu kajian ilmu politik yang berasal dari dua bidang yang berbeda yaitu ekonomi dan politik. Pemikiran-pemikiran kaitan antara ilmu ekonomi dengan politik sudah ada sejak jaman Yunani kuno, namun ilmu ekonomi politik baru terbentuk oleh ekonom klasik Adam Smith pada tahun 1776 dengan tulisannya yang berjudul *The Wealth of Nation*. Pada masa klasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Kemudian sejak munculnya pakar-pakar neoklasik ada jarak antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang disebabkan oleh berkembangnya ilmu ekonomi lewat ilmu matematika. Namun pada akhirnya pakar-pakar neoklasik ini menyadari bahwa perlunya ekonomi dan politik beriringan sebagai sistem negara. (Deliarnov, 2020)

Mufti (2018) mengungkapkan ekonomi politik sebagai gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara politik dan ekonomi. Di mana, ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak metode dan analisis dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitasi. (Dahlan dan Wildan, 2022)

Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi

pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*. (Dahlan dan Wildan, 2022)

Kemudian ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan pasar dengan kekuasaan. Dari pemahaman ini menunjukan bahwa ekonomi politik akan membangun kerangka di mana unsur pasar yang selama ini dianggap bebas tidak dapat terlepas dari intervensi politik. Hal tersebut karena adanya keterhubungan dan ketergantungan di antara keduanya. (Caporaso dan Levine, 2018; Dahlan dan Wildan, 2022)

Ekonomi politik awalnya hadir sebagai ilmu yang berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada negarawan dalam menjalakan tugasnya, yakni demi mengelola perekonomian negara agar kebutuhan warga negaranya terpenuhi. Seiring berjalanannya waktu, kesadaran untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah dengan cara mendapatkan bantuan dari orang lain. Karena tidak setiap kebutuhan dapat dipenuhi oleh sendiri, maka diperlukan kerja sama dengan pihak lain. Jika dilihat dari konteks negara, apabila negara memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, maka diperlukan interaksi dengan pihak lain atau negara lain. Untuk itu biasanya bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik. (Caporaso dan Levine, 2018).

Seperti yang telah disinggung di atas, pemenuhan kebutuhan dilihat dari konteks negara, selain melakukan interaksi dengan negara lain, negara dapat berinteraksi atau bekerja sama dengan *Non Government Organization* atau sering disingkat NGO. NGO menjadi salah satu pihak yang yang dapat berinteraksi

dengan negara dalam rangka membantu negara untuk memenuhi kebutuhannya. Adam Smith (1776) memaparkan bahwa ekonomi politik dari sudut pandang negarawan atau legislator memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menyediakan pendapatan yang melimpah, atau pendapatan masyarakat, atau untuk menyediakan banyak pendapatan atau nafkah untuk kehidupan mereka. Kedua, untuk menyediakan negara atau *commonwealth* dengan berbagai sumber daya pendapatannya untuk pelayanan publik. (Dahlan dan Wildan, 2022)

Menurut Rachbini, ilmu ekonomi politik selalu mengalami transformasi dan sangat dinamis secara teoritis, atau disebut “*problem instrumen*” yang tidak pernah tuntas. Pada masa tertentu, kajian lebih tertuju pada aspek-aspek politik dan kebijakan pemerintah, tetapi pada masa lain kadang kajian yang sama lebih tertuju pada kajian ekonomi. (Rachbini, 2006; Dahlan dan Wildan, 2022)

Sudibyo (2004) menjelaskan ekonomi politik berkembang sebagai respons terhadap akselerasi kapitalisme. Berkembang beberapa varian, seperti ekonomi politik kritis, yaitu studi ekonomi-politik yang kritis terhadap proses-proses liberalisasi, dengan mengedepankan aspek-aspek moral dan etika sosial. Adapun kritik utama dalam ekonomi politik ditujukan pada kecenderungan determinisme ekonomi, yang melihat faktorfaktor ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang menentukan dinamika masyarakat modern, dan mengabaikan agen-agen sosial, negara, pasar, dan masyarakat. (Dahlan dan Wildan, 2022)

Padahal, dalam ekonomi politik diajarkan bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Kemudian muncul subyek atau aktor besar

dalam pendekatan ekonomi politik yang disebut struktur kekuasaan dan masyarakat dalam ekonomi politik yang dikembangkan menjadi dua entitas yang disebut “suprastruktur politik” dan “infrastruktur politik”. (Yustika, 2009; Dahlan dan Wildan, 2022)

Suprastruktur politik atau disebut dengan *the ruler* (penguasa) merupakan entitas yang terdiri dari beberapa lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik dapat berarti masyarakat atau organisasi yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik/organisasi politik, ormas, pers, kelompok kepentingan, LSM, dan lain-lain. (Deliarnov, 2020; Philipus dan Aini, 2009; Dahlan dan Wildan, 2022)

Banyak keterlibatan masyarakat di dalam ekonomi dan banyak penguasa yang memiliki kepentingan di bidang pembangunan ekonomi. Dengan demikian hubungan politik dan ekonomi merupakan ketersinggungan antara suprastruktur dan infrastruktur dalam kepentingan ekonomi. Dari sinilah berkembang definisi tentang ekonomi politik yang lebih detail untuk mencerminkan hubungan ekonomi dan politik. (Caporaso dan Levine, 2018; Dahlan dan Wildan, 2022)

Pasca reformasi bergulir di Indonesia, pengaruh globalisasi telah merambah ke tingkat lokal dengan membawa paham liberalisme dan kapitalisme. Globalisasi dijadikan sebagai pintu masuk negara kapitalis untuk mencari sumber daya baru guna eksploitasi dengan harga murah dan meningkatkan harga jualnya melalui bendera organisasi internasional. Salah satu contohnya seperti *International Monetary Fund* (IMF) yang membawa pengaruh kapitalisme melalui program

restrukturisasi nasional dan menekankan saran yang wajib diikuti seperti mencabut subsidi pendidikan, minyak, dan gas bumi. (Mufti, 2018)

Kebijakan ekonomi seperti mencabut subsidi pendidikan, minyak dan gas bumi, akan memiliki berdampak kepada pembangunan ekonomi di kalangan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Dampak ini akan menimbulkan perosalan realisasi jaminan sosial ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan masyarakat di suatu daerah. Negara sudah semestinya hadir melaksanakan amanat konstitusi seperti menjamin hak setiap warga negara mendapat pengajaran (Pasal 31 UUD 1945), pemanfaatan sumber daya untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Pasal 33 UUD 1945) dan negara harus memperhatikan fakir miskin dan anak-anak terlantar (Pasal 34 UUD 1945). (Nawawi, 2015)

Pemikiran mengenai hak ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan tumbuh dan berkembang sesuai perjalanan pertumbuhan dan perkembangan perjuangan tentang hak asasi manusia. Isu mengenai hak dan kesejahteraan rakyat harus dipahami secara menyeluruh yang merupakan satu perwujudan dari etika pembangunan dan kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat. (Nawawi, 2015)

Untuk itu, ekonomi politik bukan hanya berhubungan antara pengusaha ataupun negara, organisasi non-profit seperti lembaga filantropi baik yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, keagamaan dan lainnya ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi politik. Kebijakan yang dihasilkan oleh politik akan mempengaruhi

regulasi dan pembiayaan organisasi non-profit, sedangkan sektor ekonomi akan mempengaruhi bagaimana organisasi non-profit memperoleh dan mengelola sumber daya guna mencapai tujuannya. (Powell, 2020)

Secara ekonomi, lembaga amil zakat dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dana yang telah dihimpun bertujuan untuk membiayai program pemberdayaan dan kegiatan sosial. Lembaga amil zakat juga dapat memainkan peran penting dalam membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada individu dan kelompok yang membutuhkan. (Zuchroh, 2022)

Kegiatan yang dijalankan lembaga filantropi tidak hanya beririsan dengan lingkungan sosial. Lembaga filantropi dapat dilihat sebagai lembaga yang membangun dan memiliki modal yang beririsan dengan politik. Ekonomi politik pasca perang dingin dan tembok Berlin runtuh, tidak lagi membahas konvensionalitas mengenai anatomi sistem yang diterapkan oleh negara atau pemerintah yang berakhir pada sistem kapitalisme dan sosialisme. Kajian ekonomi politik pasca perang dingin telah memandang pasar sebagai institusi pertukaran, dipakai dalam menjelaskan dasar sikap dan tindakan di luar institusi ekonomi. (Rachbini, 2006)

Pasar sebagai institusi pertukaran dalam pandangan ekonomi politik, memungkinkan lembaga amil zakat untuk melaksanakan pertukaran modal yang dimiliki dan membangun kerja sama baik formal maupun informal. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan alokasi dari sumber daya baru dan terbatas. Coase

melihat, distribusi alokasi sumber daya yang langka harus melihat kemungkinan tersedianya kelembagaan sebagai kendaraan dan aturan-aturannya. Lembaga amil zakat dapat melaksanakan pertukaran modal yang dimilikinya dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa atas lembaga pemerintahan dan aturan. (Rachbini, 2006)

Ekonomi politik kesejahteraan mempelajari mengenai distribusi kesejahteraan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, ideologi, dan institusi sosial. Caporaso dan Levine (2018) menyatakan bahwa ekonomi politik tidak hanya membahas mengenai distribusi material, tetapi membahas juga norma dan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan kelas dan kekuatan politik tertentu. (Caporaso dan Levine, 2018)

2.2 Konsep Neoliberal Filantropi

Teori neoliberal berawal dari tulisan politik klasik karya Thomas Hobbes, John Lock, dan John Stuart Mill. Inti karya tersebut menyerukan mengenai komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Para pendukung aliran neoliberal memandang bahwa kemiskinan atau kesejahteraan merupakan permasalahan individu akibat kelemahan atau ketidakmampuan individu yang bersangkutan. (Suaib, 2023)

Neoliberal merupakan suatu paradigma ekonomi politik yang berfokus pada pentingnya pasar bebas, individualisme, dan minimalisasi intervensi negara pada ranah sosial. Salah satu implikasi neoliberal adalah pergeseran penyediaan kesejahteraan dari negara kepada aktor non negara seperti lembaga swadaya masyarakat, korporasi, dan lembaga filantropi berbasis agama. Brown (2015)

menyebutkan bahwa neoliberal tidak hanya berupa kebijakan ekonomi, tetapi masuk dalam berbagai aspek kehidupan sosial termasuk penyediaan kesejahteraan. (Brown, 2015)

Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan dalam pandangan neoliberal harus bersifat residual, sementara, hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Neoliberal mentransformasikan warga negara menjadi subjek pasar yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri dan tidak sebagai pemilik hak sosial. Lembaga filantropi seperti Rumah Zakat dipahami sebagai aktor yang mengambil alih peran negara dalam kegiatan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi. Untuk itu, Rumah Zakat dapat dilihat sebagai representasi transformasi tersebut. Layanan kesejahteraan yang dijalankan Rumah Zakat tidak dijalankan melalui redistribusi negara, melainkan melalui kegiatan donasi, kewirausahaan sosial, dan pemberdayaan. (Suaib, 2023; Brown, 2015)

Lembaga filantropi pada kerangka neoliberal menjalankan aktivitasnya melalui skema teknokratik. Bantuan yang diberikan oleh lembaga filantropi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu agar dapat bersaing dalam pasar bebas. Program pelatihan keahlian, suntikan modal mikro, dan pemberdayaan, terlihat sebagai program yang progresif. Tetapi, dalam kerangka neoliberal, hal ini memperkuat asumsi bahwa kemiskinan adalah akibat dari kegagalan individu, bukan struktur sosial.

Pada kerangka neoliberal, program sosial yang berfokus pada pemberdayaan dan kewirausahaan, dianggap sebagai solusi praktis atas masalah struktural kesejahteraan. Pendekatan ini mengabaikan ketimpangan sistemik yang memerlukan intervensi struktural. Lembaga filantropi hadir mengisi ruang kosong pelayanan kesejahteraan yang belum dapat dipenuhi oleh negara yang secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai subjek neoliberal. Meskipun pada kerangka neoliberal kerja amal menjauh atau kehilangan dimensi politis, namun menurut Muehlebach (2012), kegiatan amal dapat menciptakan soliditas sosial dan lembaga filantropi mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat.

(Muehlebach, 2012)

Transformasi filantropi tradisional menjadi filantropi modern pada kerangka neoliberal dapat dilihat dari konsep manajemen seperti korporasi. Konsep ini mencakup pengelolaan organisasi sosial demi membangun kepercayaan publik dan bersaing di pasar donasi melalui pelaporan sistem informasi keuangan, audit, dan alokasi penggunaan dana pada program tertentu secara *digital*. Kepercayaan pada lembaga filantropi modern salah satunya melalui kemampuan lembaga menunjukkan data dan pelaporan yang akuntabel.

2.3 Konsep Modal Sosial

Secara sederhana modal sosial dapat diartikan sebagai manfaat yang diperoleh dan menjadi ‘sosial’. Modal sosial berorientasi kepada hubungan dan jaringan sosial yang dimanifestasikan sebagai aset dan berpotensi dikonversi menjadi keuntungan. Modal sosial dapat menjadi sumber daya bagi individu,

kelompok, atau masyarakat. Melalui modal sosial, individu atau kelompok memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk mengakses manfaat dari hubungan dan jaringan sosial yang telah terbangun. (Alfitri, 2023)

Bagi individu, modal sosial dapat dimanfaatkan sebagai pelumas untuk meningkatkan kemajuan dan bertahan dalam kehidupan sosial. Di lain sisi, kelompok atau organisasi dapat memfasilitasi kerja sama, eksistensi, dan kolaborasi. Untuk masyarakat sendiri, modal sosial dapat memberikan jalan untuk mempertahankan eksistensi dan menjaga koherensi. Modal sosial dipandang sebagai salah satu sumber kekuatan untuk mendorong tumbuhnya modal lain seperti modal budaya, modal sumber daya manusia, modal fisik, dan modal ekonomi. (Alfitri, 2023)

Modal sosial menjadi investasi bagi terciptanya sumber daya atau modal baru. Modal sosial berfokus pada potensi kelompok dan hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang tumbuh dari anggota kelompok menjadi norma kelompok. Modal sosial merupakan suatu pola jaringan, kepercayaan, norma dan nilai, Unsur-unsur tersebut merupakan pembentuk dari modal sosial itu sendiri. (Alfitri, 2023)

Bourdieu adalah nama beken dari Pierre Félix Bourdieu, seorang filsuf, sosiolog, etnolog, dan anthropolog kondang berkebangsaan Perancis pada abad ke-20. Dengan demikian, sangat jelas bahwa, teori ini pada mulanya diformulasikan, dikembangkan, dan dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu. Dalam konsepsi Bourdieu,

gaya hidup dipahami sebagai keseluruhan selera, kepercayaan dan praktik sistematis yang menjadi ciri suatu kelas, opini politik, keyakinan filosofis, keyakinan moral, selera estetis, makanan, pakaian, dan lain-lain. (Mardimin, 2016)

Bourdieu mengatakan, kekuasaan seseorang dalam masyarakat berhubungan erat dengan modal-modal yang dimiliki, serta komposisi dan akumulasi dari modal-modal yang dimiliki tersebut. Dalam konsepsinya tentang capital, Bourdieu memberi tekanan pada komposisi dan akumulasi, karena kebernilaian dan bobot suatu *capital* berbeda-beda tergantung medan-medan sosialnya, serta posisi-posisi sosial pemiliknya. Bourdieu menegaskan bahwa, lapangan (*fields*), atau ranah (medan perjuangan) yang berbeda-beda memberi nilai tipe-tipe atau bentuk-bentuk capital yang berbeda-beda pula. (Mardimin, 2016; Field, 2011)

Menurut pengertian umum, konsep modal (*capital*) adalah konsepsi yang biasa dipakai dalam khasanah ilmu ekonomi, yang menunjuk pada uang atau barang yang digunakan sebagai pokok, sebagai dasar, atau sebagai bekal usaha untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Bourdieu menggunakan istilah *capital* (modal) dalam konsepsi sosiologinya untuk menjelaskan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, karena *capital* (modal) memiliki ciri-ciri yang, menurut Bourdieu, dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. (Mardimin, 2016; Field, 2011)

Dalam konteks pemikiran Bourdieu, konsep *capital* (modal) dipakai untuk menunjuk keseluruhan sumber daya atau kualitas yang dimiliki oleh individu-

individu atau posisi-posisi sosial yang memiliki pengaruh atau nilai sosial. Selain itu, dalam sosiologi Bourdieu, konsep modal juga digunakan untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, dan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial tertentu. Menurut Bourdieu, semakin besar sumber daya (*capital*) yang dimiliki, baik dari segi komposisi maupun jumlahnya (diferensiasi dan distribusinya), maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, dalam komunitas sosial, para pelaku sosial akan menempati posisi masing-masing yang ditentukan oleh besaran modal dan komposisi modal yang dimiliki oleh masing-masing pelaku sosial. (Mardimin, 2016; Field, 2011)

Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan jumlah sumber daya baik aktual maupun maya, yang terakumulasi pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Modal sosial adalah hubungan sosial yang dibutuhkan untuk memposisikan klien ke posisi penting secara sosial yang dapat menjadi alat tukar contohnya dalam karir politik. Selain itu, Bourdieu mencatat dalam rangka mempertahankan nilai dari modal sosial tersebut, individu tersebut harus mengupayakannya. (Field, 2011)

Konsep modal sosial Bourdieu sangat mementingkan identitas dan menjadi milik eksklusif elit yang mengamankan posisi dan status mereka di masyarakat. Modal sosial dapat membantu membangun dan menjaga jaringan sosial baik dengan individu maupun kelompok. Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial

yang dimiliki pelaku baik individu atau kelompok, dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. (Plaituka,dkk, 2018)

Berdasarkan definisi modal sosial Bourdieu, terdapat dua hal penting dalam memahami modal sosial:

1. Sumber daya yang dimiliki individu berkaitan dengan keanggotaan individu tersebut dalam kelompok dan jaringan sosial yang besarannya tergantung kemampuan individu dalam memobilisasi hubungan dan jaringan dalam kelompok atau dengan individu lain di luar kelompok.
2. Kualitas hubungan antar aktor lebih penting dibandingkan hubungan dalam kelompok. (Suaib, 2023)

Bourdieu memandang jaringan sosial tidak memiliki sifat alami. Jaringan sosial dibangun melalui kegiatan investasi yang berfokus pada pelembagaan hubungan kelompok yang kemudian dapat digunakan untuk meraih keuntungan. Inti dari modal sosial adalah membangun jaringan dan kesepahaman norma bersama. Tetapi, pemahaman norma bersama belum cukup dalam menjamin kerja sama antar individu. Hal ini disebabkan adanya individu yang tidak taat atau *moral hazard*. (Suaib, 2023)

Pada pandangan Bourdieu, terdapat ketergantungan dari ukuran jaringan koneksi yang dapat bermobilisasi dan muatan modal lainnya. Bourdieu berpendapat bahwa modal sosial adalah investasi dari kelompok dominan sebagai bentuk menjaga dan mereproduksi soliditas kelompok serta mempertahankan posisi dominan kelompok. Modal sosial adalah modal yang dapat membangun komunitas

sipil yang berfungsi dalam meningkatkan pembangunan partisipatif, sehingga dasar modal sosial adalah kepercayaan, ideologi, dan religi. Modal sosial memberikan potensi bagi individu untuk mengikuti keputusan milik komunitas. (Alfitri, 2023)

Menurut Lesser (2000), bagi komunitas, modal sosial menjadi sangat penting karena memberikan kemudahan dalam akses informasi, menjadi media pembagian kekuatan, media pengembangan soliditas, memberikan potensi mobilisasi sumber daya yang dimiliki, dan memungkinkan pencapaian bersama serta membentuk perilaku kebersamaan. (Lesser, 2000; Alfitri, 2023)

Menurut Alfitri (2023), terdapat modal sosial yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, yaitu kebersamaan, soliditas, toleransi, semangat kerja sama, dan kemampuan berempati. Di era globalisasi saat ini dan perekonomian dunia yang menekankan pasar bebas, semakin menunjukkan sistem perekonomian yang didominasi peran pengetahuan dan keterampilan dari individu. Aktivitas ekonomi menjadi representasi bagian krusial dari kehidupan sosial sehingga tidak terlepas dari pengembangan individu itu sendiri. (Alfitri, 2023)

Partha dan Ismail (2009) memberikan pandangan bahwa modal sosial merupakan hubungan yang tercipta dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Menurut Jones (2015), modal sosial terbagi menjadi dimensi kognitif dan struktural. Dimensi kognitif merupakan mediator yang menghubungkan antara manfaat ekonomi dan penduduk yang berperilaku pro lingkungan. Sedangkan dimensi struktural meliputi komposisi, praktek,

kelembagaan formal dan informal yang membantu menunjang fasilitas saling memanfaatkan dalam tindakan kolektif. (Partha dan Ismail, 2009; Jones, 2015; Alfitri, 2023)

Inti dari modal sosial adalah norma, kepercayaan, dan jaringan. Modal sosial menjadi penghubung dalam membangun norma dan kepercayaan dalam struktur jaringan. (Frick, 2012; Alfitri, 2023)

2.3.1 Norma

Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan akan diikuti oleh setiap anggota dalam suatu lingkungan. Norma menjadi aturan kolektif yang tidak tertulis tetapi dapat dipahami oleh setiap anggota kelompok tertentu dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam lingkungan masyarakat. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh karismatik yang membangun tata cara perilaku individu dalam suatu kelompok masyarakat yang secara spontan menimbulkan modal sosial dalam menentukan kerangka kepentingan pribadi dan kelompok. (Hasbullah, 2006; Fukuyama, 2000; Alfitri, 2023)

2.3.2 Kepercayaan

Kepercayaan adalah bentuk keputusan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial dengan dasar keyakinan bahwa orang lain akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan serta senantiasa bertindak sesuai pola saling mendukung atau setidaknya tindakan yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri atau kelompok. Kepercayaan

memberikan kontribusi dalam meningkatkan modal sosial. Kepercayaan mampu memfasilitasi masyarakat untuk saling bekerja sama dan kepercayaan dibagi menjadi dua, yaitu kepercayaan kepada individu yang kita kenal serta kepercayaan kepada individu yang tidak kita kenal. (Putnam, 1995; Fukuyama, 2001; Alfitri, 2023)

Untuk meningkatkan kepercayaan dalam suatu kelompok, terdapat 4 hal mendasar yang dibutuhkan, yaitu penerimaan sebagai sikap diterimanya individu dalam kelompok melalui rasa aman dan keikutsertaan kontribusi dalam kelompok. Yang kedua adalah berbagi informasi dan kepedulian. Dalam menumbuhkan kepercayaan dibutuhkan pertukaran informasi yang jujur dan terbuka. Kemudian yang ketiga menentukan tujuan. Keikutsertaan anggota dalam proses menentukan keputusan dan komitmen bersama dalam perumusan tujuan. Yang keempat merupakan pengorganisasian dan tindakan. (Alfitri, 2023)

2.3.3 Jaringan

Inti dari modal sosial yang ketiga adalah jaringan. Modal sosial terletak pada posisi yang tumbuh dalam suatu kelompok sehingga dapat bersosialisasi sebagai bagian dari nilai-nilai yang melekat. Jaringan hubungan yang tumbuh ini sesuai dengan karakteristik dan orientasi yang dibangun kelompok dengan ciri khas tertentu. Jaringan biasanya terbentuk atas tradisi turun temurun dan kesamaan kepercayaan. (Mawardi, 2007; Alfitri, 2023)

Jaringan sosial membentuk suatu kelompok sosial yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta norma pertukaran. Jaringan ini dapat dibentuk karena adanya kesamaan baik asal daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genalogis, dan lainnya. Jaringan yang telah terbentuk ini diorganisasikan menjadi institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Kekuatan jaringan bergantung kepada sudut apa jaringan tersebut, yaitu pertimbangan asal dan pada tingkat mana jaringan tersebut. Pada tingkat tujuan jaringan masyarakat akan kuat dan tebal tetapi akan mulai melemah pada tingkatan daerah, nasional, dan internasional(Alfitri, 2023)

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang didirikan kader PKS yaitu Abu Syauqi (Deni Triesnahadi). Abu Syauqi pernah dicalonkan oleh PKS menemani Taufikurrahman pada pemilihan Walikota Bandung tahun 2008. Sejarah ini mengisyaratkan Rumah Zakat tidak dapat terlepas dari afiliasi sejarah dan kultural Abu Syauqi sebagai pendirinya.

Ketika Abu Syauqi masih memimpin Rumah Zakat, beliau melakukan studi banding ke manajemen perusahaan di Singapura. Pasca studi banding tersebut, Rumah Zakat mulai bertransisi laiknya korporat dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas yang dapat menunjang bersaing dalam pasar donasi yang kompetitif. Rumah Zakat berfokus pada layanan kesejahteraan berbasis komunitas yang memiliki tujuan untuk menaikan kelas penerima manfaat sehingga menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Layanan kesejahteraan dan manajemen laiknya korporat mencerminkan bagaimana Rumah Zakat beroperasi pada kerangka neoliberal. Program yang telah dijalankan dan manajemen modern melalui akuntabilitas program dan keuangan menumbuhkan jaringan dan kepercayaan dari relawan, penerima manfaat, dan donatur. Pola ini secara tidak langsung memberikan jalan bagi Rumah Zakat dalam membangun modal sosial.

Afiliasi sejarah dan kultural Abu Syauqi yang berpotensi masih melekat di Rumah Zakat, memungkinkan adanya irisan antara Rumah Zakat dan PKS. Modal sosial yang dimiliki dan dibangun oleh Rumah Zakat memiliki potensi dan

kemungkinan untuk dimanfaatkan pada misi jangka panjang partai sebagai agenda penetrasi kultural di masyarakat sehingga dapat mempertahankan dan menumbuhkan citra positif partai sebagai partai yang peduli.

Hipotesis dari penelitian ini adalah dugaan potensi pemanfaatan modal sosial Rumah Zakat untuk mendukung misi jangka panjang partai. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan teori modal sosial Pierre Bourdieu. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Rumah Zakat yang hadir mengisi layanan kesejahteraan yang belum dapat diisi oleh negara. Rumah Zakat menjadi pusat jaringan dari relawan, penerima manfaat, donatur dan menjadi modal sosial yang berpotensi dapat dimanfaatkan secara politik.